



## Peran Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pembangunan di Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor

### *The Village Head's Leadership Role for Development in Ciangsana Village, Gunung Putri District, Bogor Regency*

Salsabila Ramadanti<sup>1\*</sup>, Evi Priyanti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

\*E-mail: : 1910631180037@student.unsika.ac.id

---

#### Abstrak

Kepemimpinan kepala desa dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pembangunan desa, ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yaitu tugas pembangunan. Keberhasilan pembangunan desa tergantung pada dukungan seluruh masyarakat, dan sangat dipengaruhi oleh bagaimana peran para pihak yang menjadi koordinator pelaksanaan pembangunan. Untuk menggunakan peran mereka secara efektif dan benar-benar berkontribusi pada proses pembangunan dalam situasi ini, pemerintah harus dapat membentuk beberapa unit pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Metodologi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Temuan studi mendukung gagasan bahwa pemimpin desa sangat penting untuk pengembangan masyarakat. Tanggung jawab kepala desa lainnya termasuk menginspirasi, memfasilitasi, dan memunculkan ide-ide baru untuk inisiatif pembangunan lokal. Terbukti, kepala desa ikut aktif membangun infrastruktur desa untuk kepentingan lingkungannya.

**Kata Kunci:** Peran Kepala Desa, Pembangunan, Partisipasi Masyarakat.

#### Abstract

*The village head's leadership in the community cannot be separated from the success of village development, this is also the responsibility of the local government, namely the task of development. The success of village development depends on the support of the entire community, and is greatly influenced by the role of the parties who are coordinators of development implementation. In order to use their role effectively and really contribute to the development process in this situation, governments must be able to form several governmental units. This study aims to determine the role of village heads in infrastructure development in Ciangsana Village, Gunung Putri District, Bogor Regency. This research methodology is descriptive qualitative. The findings of the idea study support that village leaders are essential for community development. Other responsibilities of village heads include inspiring, facilitating, and generating new ideas for local development initiatives. Evidently, village heads actively participate in building village infrastructure for the benefit of their environment.*

**Keywords:** The Role of the Village Head, Development, Community Participation.

---

**Cara citasi :** Ramadanti, Salsabila, Priyanti, Evi. (2023). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pembangunan di Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* Vol 4 No 1 Maret 2023, 50-60.

---

## **PENDAHULUAN**

Semua potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan pembangunan. Seperti kuantitas potensi manusia serupa, maka diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan agar dapat mengembangkan dan memanfaatkan sepenuhnya potensi yang sudah ada. Berbagai rencana dan program pembangunan telah dibuat dan dilaksanakan sebagai semacam pemerintahan. Hal tersebut secara khusus tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Pembangunan Perkotaan yang artinya “Upaya peningkatan taraf hidup dan penghidupan untuk sebesar-besarnya kepentingan negara”. Dalam daftar standar pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 yaitu untuk melaksanakan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, perangkat desa bekerja sama dengan seluruh masyarakat desa. Pemerintah daerah merencanakan pembangunan negara sesuai dengan kewenangannya yang diarahkan pada rencana pembangunan kota.

Keberhasilan pelaksanaan proyek pada pembangunan sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan dan melakukan inisiatif pembangunan juga diperlukan. Pemerintah pusat Indonesia sekarang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menjalankan rumah sendiri sebagai akibat dari pelaksanaan rezim reformasi; tindakan ini dapat dianggap sebagai semacam otonomi daerah. Agar pemerintah daerah dapat berfungsi secara efektif sebagai mesin pemerintah pusat dalam proses pembangunan, mereka harus dapat mengakomodasi, mengelola, dan memobilisasi sumber daya yang sudah ada di seluruh yurisdiksinya (Warouw, M., Rengkung, R. L., & Pangemanan, P.A., , 2015).

Pengamatan sementara menunjukkan bahwa peneliti dari Desa Ciangsana yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa tergolong rentan. Meskipun beberapa infrastruktur desa rusak, masalah utama Desa Ciangsana adalah pertumbuhan sistem jalan yang tidak merata. Pemerintah desa perlu mendapat perhatian segera. Dalam hal peran masyarakat dan kepemimpinan kepala desa serta kewenangannya sangat penting bagi pertumbuhan desa, pembangunan desa yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor tersebut. Sebenarnya manfaat dari renovasi tersebut tidak dirasakan oleh warga Desa Ciangsana secara keseluruhan. Kondisi jalan Desa Ciangsana sangat memprihatinkan, terutama dalam hal rehabilitasi infrastruktur jalan.

Jalan penuh dengan genangan air. Sampai saat ini akses jalan belum diaspal dan infrastruktur jalan hanya dicor, tidak bertahan lama karena pengecoran kembali rusak setelah satu atau dua bulan akibat bangunan yang dibuat tidak sesuai SOP. Pemerintah daerah membangun jalan yang jika berbahaya untuk dilalui, akan tertutup tanah dan tidak dapat dilalui mobil selama musim hujan. Keselamatan pengendara bisa terancam jika terpaksa dilewati.

Keterlibatan masyarakat yang aktif sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur jalan karena tanpanya, tujuan ini tidak akan tercapai seperti yang diharapkan. Partisipasi warga Desa Ciangsana sangat menentukan keberhasilan dan perkembangan masyarakat. Baik keterlibatan secara langsung atau tidak langsung. Kehadiran desa merupakan tanda utama implementasi demokrasi daerah dan kegagalan pemerintahan suatu negara. Perlu adanya keterlibatan masyarakat yang signifikan untuk membangun masyarakat yang demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Institusi terpenting yang dekat dengan masyarakat adalah BPD, yang memainkan peran penting sebagai mitra dalam mempertahankan dan memajukan pemerintahan desa. Penggabungan undang-undang, peraturan, dan pengawasan desa, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran desa. Pembiayaan dari berbagai penyandang dana dan kelompok nirlaba, seperti bantuan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk mendorong pembangunan perkotaan, dan bantuan pemerintah pusat dalam bentuk subsidi pemerintah.

Melalui penelitian ini, mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembangunan Desa Ciangsana, dilakukakn secara bertahap mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan, masih relatif lemah dari segi substansi pembangunan. Beberapa tantangan dihadapi dalam proses perencanaan pertumbuhan sebagai akibat dari kurangnya ikatan pengetahuan dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat sama-sama dianggap sebagai sumber kesulitan, demikian pula faktor internal dan eksternal. Konflik-konflik yang muncul di lingkungan sekitar dapat menjadi penghambat perkembangan desa. Konflik dalam masyarakat merupakan faktor utama dalam penelitian ini yang menghambat desa dalam melaksanakan pembangunan.

Hal ini karena pemerintah desa menggunakan isu-isu sosial untuk melakukan pembangunan fisik. Pemerintah Desa Caingsana sedang mengerjakan sejumlah inisiatif

pembangunan, termasuk perbaikan jalan, untuk memudahkan penduduk mengakses rumah mereka dan pemukiman antar desa lainnya. Berdasarkan uraian latar belakang “Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor”, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tambahan untuk memahami peran kepala desa pada judul tersebut.

Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, tim, atau lembaga. Persyaratan yang merupakan salah satu tanggung jawab lembaga biasanya menyatakan peran lembaga atau organisasi yang diperlukan.

Kepala desa bertugas mengatur, mengarahkan, dan memulai pembangunan baru. Dalam rangka mewujudkan program swadaya masyarakat dan mencapai pembangunan desa yang terencana, posisi kepala desa sangat menentukan. Dalam rangka menjalankan strategi untuk meningkatkan kemandirian lokal dan fungsi kepala desa sangat penting untuk memungkinkan pembangunan desa yang terencana. Kinerja kepala desa yang menjabat sebagai kepala pemerintahan dan mengatur urusan desa dapat dijadikan tolak ukur kemajuan kita. Peran Kepala Desa sangat menentukan bagi kemajuan dan pembangunan desa (Bawanda, 2015). Berdasarkan teori peran Suharto (Suharto, 2006) keterlibatan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ciangsana menjadi topik kajian ini. Fungsi tersebut antara lain :

1. Peran kebijakan, khususnya kebijakan yang dibuat oleh kepala desa dalam melaksanakan pembangunan.
2. Peran sebagai strategi yang digunakan kepala desa untuk mencapai pengembangan masyarakat dan mendapatkan dukungan atau partisipasi masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi, khususnya berfungsi sebagai alat komunikasi, khususnya sebagai alat pendataan atau alat yang akan digunakan untuk membantu menentukan cara mencapai pembangunan.

Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999, Kepentingan masyarakat setempat dikelola dan dijunjung tinggi oleh desa sebagai kesatuan masyarakat yang diakui secara formal yang berfokus pada pariwisata dan tradisi daerah. Hal ini dapat ditemukan di wilayah kabupaten.

Kepala desa adalah pejabat tertinggi dalam pemerintahan desav yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada aparatur desa sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang.

Adapun apa yang oleh beberapa ahli dianggap sebagai pembangunan, Rogers (Rochajat Harun, Elvinaro Ardianto, 2011) mendefinisikannya sebagai pergeseran yang menguntungkan menuju struktur sosial dan ekonomi yang dipilih sesuai dengan kehendak suatu bangsa. Suatu usaha yang dipandang lebih masuk akal dan terorganisir untuk pembangunan masyarakat daripada pembangunan yang sekarang atau tidak direncanakan adalah pembangunan berikutnya yang lebih terencana (Subandi & Hani Hanita Humanisa, 2011).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Sebuah strategi yang dikenal sebagai pendekatan kualitatif deskriptif diterapkan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan faktor-faktor yang berhubungan dengan peran kepala desa dalam pencapaian pembangunan di Desa Ciangsana Kabupaten Bogor.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Desa Ciangsana. Lokasi ini dipilih karena menurut pengamatan petugas lapangan telah terlihat berbagai perubahan dan perkembangan yang signifikan, terutama dalam hal pembangunan desa.

### **Unit Penelitian**

Unit penelitian adalah objek atau sumber daya yang menjadi subjek penelitian dan dianggap sebagai subjek penelitian. Seluruh rangkaian data akan berfungsi sebagai dasar untuk mengidentifikasi koneksi dan masalah, membuat analisis menjadi lebih mudah. Perangkat desa dan warga Desa Ciangsana di Kabupaten Bogor dijadikan sebagai unit analisis kajian.

### **Informan**

Partisipan yang memahami pelaku penelitian dan menganggapnya sebagai objek disebut informan penelitian. Berikut sumber data yang digunakan informan untuk menyusun data penelitian ini:

1. Mereka yang memiliki keahlian mendalam tentang isu yang diteliti dianggap sebagai informan kunci. Informan kunci untuk penelitian ini adalah: Bapak Mulyadi Ardiansyah sebagai koordinator utama.

2. Orang yang memberikan informasi tetapi tidak secara aktif terlibat dalam interaksi sosial dianggap sebagai informasi tambahan. Masyarakat Desa Ciangsana menjadi informan tambahan dalam kasus ini yaitu : Ibu Nabila dan Bapak Nazarudin.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Saat melakukan penelitian lapangan, perlu dilakukan pengumpulan data dan informasi dengan tujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah yang dihadapi dan mencari solusi. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti atau diperoleh langsung dari lapangan disebut sebagai data primer. Mengikuti pendekatan langsung ke lokasi penelitian, jenis data berikut dapat dikumpulkan:

- a. Pengamatan

Menggunakan panca indera dan panca indera tambahan untuk membantu keterampilan observasi. Dalam penelitian ini data observasi dikumpulkan dengan cara mengamati langsung keadaan desa dengan tetap memperhatikan perkembangan baik fisik maupun non fisik.

- b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan informan yang telah bertekad untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan masalah studi. Dalam wawancara ini, arahan wawancara digunakan sebagai panduan wawancara sehingga mereka dapat lebih terkonsentrasi dan koherensi. Partisipasi dalam kehidupan informan merupakan salah satu ciri wawancara mendalam.

- c. Dokumentasi

Menganalisis semua catatan dan dokumen milik kepala desa terpilih adalah salah satu cara untuk mendapatkan data melalui dokumentasi. Dalam hal ini, informasi tentang masyarakat setempat dikumpulkan untuk penelitian.

2. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dari suatu topik penelitian secara tidak langsung disebut sebagai data sekunder. Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini, menggunakan studi perpustakaan penelitian dan perangkat lunak perekaman. Informasi diambil dari buku referensi, surat, berita, tesis, publikasi majalah, dan situs

web. Relevansi data dengan masalah penelitian kemudian dinilai. Informasi tersebut kemudian dievaluasi relevansinya dengan pertanyaan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kepala desa bertanggung jawab atas pembangunan lingkungan. Pengertian “pembangunan desa” dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatur tentang pembangunan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, bina kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa dalam peraturan ini disebut dengan “pembangunan desa”.

Perekonomian dusun Ciangsana masih berjuang, dan jalan-jalan semua dalam kondisi buruk sampai infrastruktur dibangun. Setelah pelaksanaan program, infrastruktur di desa berkembang tanpa kendala, yang sangat baik bagi perekonomian dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Di Desa Ciangsana, di mana penduduk memiliki usaha sendiri seperti restoran, toko kelontong, dan toko ritel, pembangunan desa kontemporer telah meningkatkan ekonomi lokal dan memperkuat daerah tersebut.

### **Peran Kepala Desa Dilihat Dari Dimesi Sebagai Merumuskan Kebijakan Dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Ciangsana**

Kepala desa memiliki tugas vital mengawal cerdas, tetapi untuk melakukan pertumbuhan intensif, ia juga harus menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana. Untuk mendukung tujuan pengembangan masyarakat, Kepala Desa memberikan layanan yang luar biasa untuk mempertahankan jumlah ruang terbuka terbesar. Masyarakat Desa Ciangsana secara aktif berkontribusi terhadap infrastruktur yang kini sedang dibangun. Sebagai hasil dari kemajuan pemerintah dalam pembangunan desa dan program masyarakat desa, sekarang lebih mudah bagi masyarakat di Ciangsana untuk melakukan tugas sehari-hari di mana pun mereka pilih, seperti berpindah berpindah antar desa untuk menjalankan tugas sehari-hari dengan lebih cepat dan efisien karena tersedia jalan yang memadai.

Aparatur Desa Ciangsana membuat tim pelaksana DPK melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menginformasikan bahwa jalan tersebut akan dibangun dan digunakan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Perkembangan masyarakat Desa Ciangsana telah mengalami berbagai perubahan. Di Desa Ciangsana, pengembangan masyarakat dilakukan dengan berbagai perubahan yang

diperoleh desa itu sendiri dari masyarakat dan pihak lain. Perubahan tersebut antara lain kerjasama masyarakat yang baik dengan kepala desa dan perwakilan desa yang mengikuti setiap komunitas memastikan bahwa setiap kegiatan dilakukan dengan benar.

Strategi kepala desa seperti di desa ini mempunyai rancangan pembangunan jangka menengah Desa disusun dalam Musrembangdes musyawarah rencana pembangunan satu tahun sekali yang direncanakan yang diusulkan oleh lingkungan sebagai lembaga masyarakat RT, RW yang dipimpin oleh perangkat desa yaitu seorang kepala dusun yang ditugaskan di lingkungan oleh kepala desa dengan strategi tersebut melaporkan apa saja skala prioritas yang akan dibangun di lingkungan tersebut. Di Desa Ciangsana, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa berupaya agar pelaksanaannya tepat dan mampu membantu aktivitas rutin individu dalam memenuhi kebutuhan keuangannya. Selanjutnya, warga berkeinginan untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan yang dilakukan di Desa Ciangsana (Wijayanto, 2014).

### **Peran Kepala Desa Dilihat Dari Dimesi Sebagai Strategi Dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Ciangsana**

Pemerintah desa dan masyarakat harus mampu mengontrol lingkungan dan berpartisipasi dalam pembangunan desa. Masyarakat mengambil bagian dalam pembangunan desa sebagai subyek bukan sebagai obyek.. Banyak variabel telah ditemukan sebagai penanda yang baik tentang seberapa baik suatu komunitas akan berkembang. Salah satunya dengan melibatkan lingkungan dalam kegiatan tersebut. Pelaksanaan pembangunan ini mendapat banyak dukungan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Pemerintah desa harus mampu mengakomodir semua tujuan, pandangan, keinginan, dan kebutuhan agar tidak terjadi konflik di masyarakat. Desa Ciangsana mencontohkan pembangunan desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa di dalamnya. Mardijani (Mardijani, 2010) mengidentifikasi tiga karakteristik utama yang berdampak signifikan terhadap bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, yaitu:

- a. Masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi.
- b. Masyarakat bersedia ambil bagian.
- c. Masyarakat memiliki kapasitas untuk berpartisipasi.

Ibu Nabila dan Bapak Nazarudin menyebutkan hal berikut tentang salah satu inisiatif pembangunan partisipatif Desa Ciangsana selama wawancara: “Ya, masyarakat

berpartisipasi dalam diskusi, yang dapat saya buktikan karena masyarakat selalu berkonsultasi sebelum pembangunan jalan. Misalnya jalan selalu didiskusikan terlebih dahulu sehingga kita mengetahui jalan mana yang harus diperbaiki dan digunakan untuk pembangunan di Desa Ciangsana. Tokoh masyarakat, pemuda dan organisasi semua dilibatkan oleh pemerintah desa di lingkungan“.

### **Peran Kepala Desa Dilihat Dari Dimesi Sebagai Cara Berkomunikasi Dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Ciangsana**

Salah satu narasumber, Pak Nazarudin, mengemukakan hal tersebut dengan mengatakan bahwa pelibatan masyarakat dimulai dari tahap perencanaan pembangunan desa : “Intinya kalo ada pembangunan di suatu wilayah itu aparat Desa Ciangsana pasti ada sosialisasi disampaikan kepada warga”. Kepala Desa menjadikan ini sebagai forum dan kesempatan bagi warga sekitar untuk berpartisipasi dan membicarakan proyek pembangunan yang akan datang. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah nama yang diberikan untuk percakapan ini (Musrenbangdes). Masyarakat desa memiliki banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes, dan mendiskusikan masalah dan solusi potensial di tingkat desa sebelum pindah ke tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi (Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I, 2014). Namun dalam penelitian ini aparat Desa Ciangsana diikutsertakan dalam proses musyawarah untuk membentuk desa yang partisipatif dan sesuai pembangunan. Menurut Kepala Dusun Ciangsana, desa ini menggunakan pembangunan partisipatif yang melibatkan seluruh masyarakat dalam setiap tahapan prosesnya.

Berdasarkan temuan dari wawancara dengan anggota masyarakat dan panitia perencanaan, masyarakat mengambil bagian dalam inisiatif pengembangan masyarakat. Hal ini terlihat dari keinginan masyarakat untuk bertukar keyakinan, pandangan, dan gagasan dalam rangka memajukan pembangunan desa. Forum diskusi masyarakat tersedia di dusun ini sehingga warga dapat mencapai kesepakatan tentang gagasan dan tujuan mereka selama proses pembangunan. Tokoh Pemuda, Lembaga Masyarakat Desa (LKMD), Karang Taruna, dan forum lainnya yang telah terbentuk sebelum pembangunan desa Ciangsana direncanakan dan dilaksanakan. Namun, kurangnya jalur informasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menyebabkan sejumlah tantangan dalam proses perencanaan pembangunan. Hambatan yang datang dari masyarakat dan pemerintah sama-sama dianggap sebagai hambatan yang muncul dari dalam maupun

dari luar. Konflik-konflik yang muncul di lingkungan sekitar dapat menjadi penghambat perkembangan desa. Menurut laporan ini, ketidaksepakatan masyarakat merupakan hal utama yang menghambat upaya desa untuk melaksanakan pembangunan. Ini akibat persoalan lahan ulayat yang dimanfaatkan untuk pembangunan fisik oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, komunikasi dalam pembangunan desa harus mampu mendukung pelibatan masyarakat dalam segala bentuk pembangunan, baik dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan maupun terlibat dalam kegiatan pelaksanaan dan evaluasi.

## **SIMPULAN**

Terbukti kontribusi Kepala Desa terhadap pembangunan Desa Ciangsana belum sepenuhnya terealisasi. Menurut pemikiran Suharto hal ini dapat dilihat melalui 3 aspek, yaitu: Peranan kepala desa sebagai pembuat kebijakan, setelah pelaksanaan program perbaikan infrastruktur jalan di desa berkembang tanpa kendala, sangat baik bagi perekonomian dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Desa Ciangsana hal ini menyebabkan perekonomian desa meningkat dari sebelumnya yang berdampak pada kehidupan masyarakat yang sudah sejahtera. Masyarakat memberikan perhatian yang beragam terhadap segala kemajuan di lingkungan pemerintahan Ciangsana, dan cukup tanggap dan bersemangat akan hal ini, menunjukkan partisipasi masyarakat yang kuat. Hal ini tentunya sangat menguntungkan fungsi kepala desa dalam pembangunan. Masyarakat dan aparat Desa Ciangsana dinilai memiliki kerjasama yang kurang baik. Hal ini terlihat dari cara interaksi aparatur desa dengan masyarakat yang mengalami kesalahpahaman dan menghadapi tantangan dari pemerintah daerah terkait aksesibilitas infrastruktur desa. Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah kepala desa di Desa Ciangsana lebih memperhatikan tokoh masyarakat lainnya agar tidak memandang rendah pembangunan desa khususnya pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pengaspalan, saluran irigasi, dan pengaspalan jalan karena sama-sama perlu dan harus menciptakan keadilan bagi masyarakat. Kepala desa juga harus menyadari kekurangan dan kekurangan masyarakat dalam upaya meningkatkan infrastruktur lokal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bawanda, W. (2015). *Peran Kepala Desa Distrik Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Distrik Makbon Kabupaten Sorong. Jurnal Politico.*
- Mardijani, P. (2010). *Partisipasi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa.* 1-8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mengatur tentang pembangunan desa.

Rochajat Harun, Elvinaro Ardianto. (2011). *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial: Perspektif Domnan, Kajian Ulang, dan Teori Kritis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Subandi & Hani Hanita Humanisa. (2011). *Science And Tecnology Development: Some Cases In Perpective*. Bandung: Rosda.

Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Jurnal Sosial dan Humaniora*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pengertian Desa.

Warouw, M., Rengkung, R. L., & Pangemanan, P.A., . (2015). *Kajian Faktor-Faktor Dalam Proses Pembangunan Desa Di Era Otonomi Daerah Kecamatan Sinonsayang*.

Wijayanto, D. (2014). *Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa*. *Jurnal Independent*, 40-50.